Miko Ginting & Partners
Strategic Law Practices

CLIENT BRIEF
16 November 2026

PKWT dalam UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (**"UU 27/2026"**) diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan **berlaku sejak tanggal diundangkan** (Pasal 313).

UU ini mencabut UU 13/2003 secara keseluruhan serta **Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam Lampiran UU 6/2023** (Pasal 311).

Client Brief ini secara khusus membahas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang diatur dalam Pasal 80 s.d. 91 serta pasal-pasal terkait.

Poin utama

- **Durasi lebih ketat:** maksimal 2 tahun + 2 kali perpanjangan @ maksimal 1 tahun (**total maksimal 4 tahun**). Sebelumnya, diperbolehkan hingga 5 tahun (dikukuhkan melalui Putusan MK 168/PUU-XXI/2023).
- **Pelanggaran syarat PKWT berujung pada PKWTT "demi hukum"** (tidak tertulis, atau dibuat untuk pekerjaan yang tidak memenuhi Pasal 87).
- **Kewajiban administratif naik ke level UU:** pencatatan dan uang kompensasi kini diatur langsung dalam UU. Sanksi administratif ditegaskan untuk uang kompensasi dan pelanggaran bahasa, sedangkan pemberitahuan perpanjangan 7 hari menjadi kewajiban tegas dalam Pasal 82(3).
- **Peraturan Pemerintah pelaksana** wajib diterbitkan paling lambat 28 Oktober 2027 (Pasal 312). Sementara itu, peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310).

Ketentuan PKWT

Aspek	Ketentuan	Pasal
Jenis pekerjaan	Hanya untuk pekerjaan yang menurut sifatnya selesai dalam waktu tertentu: sekali selesai/sementara; diperkirakan selesai maksimal 2 tahun; musiman; produk/kegiatan baru atau masih percobaan; tidak tetap. **Dilarang untuk pekerjaan tetap.**	87(1) s.d. (2)
Durasi dan perpanjangan	Maksimal 2 tahun, diperpanjang paling banyak 2 kali @ maksimal 1 tahun. Pemberitahuan tertulis rencana perpanjangan **paling lambat 7 hari** sebelum PKWT berakhir.	82

Disclaimer: Informasi ini bersifat umum, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, silakan konsultasikan dengan penasihat hukum Anda.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id

Aspek	Ketentuan	Pasal
Bentuk, bahasa, percobaan	Wajib tertulis, berbahasa Indonesia dan berhuruf latin (versi Indonesia yang berlaku jika bilingual; pelanggaran bahasa dikenai peringatan tertulis/denda administratif). Tidak tertulis: demi hukum PKWTT. Masa percobaan dilarang dan batal demi hukum. Masa kerja tetap dihitung.	83 s.d. 86
Pencatatan	Dicatatkan kepada Pemerintah Pusat/Daerah paling lambat **3 hari kerja** sejak ditandatangani. Dapat diakses pekerja dan pengawas ketenagakerjaan.	87(3) & (4)
Uang kompensasi	Wajib dibayar saat PKWT berakhir karena salah satu alasan di Pasal 81(1) (termasuk berakhirnya jangka waktu dan selesainya pekerjaan), sesuai masa kerja. Sanksi: peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian/seluruh kegiatan usaha. Besaran diatur dalam PP.	88 s.d. 89
Pengakhiran dini	Pihak yang mengakhiri sebelum jangka waktu berakhir wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai berakhirnya PKWT.	90
Pelanggaran syarat	Demi hukum menjadi PKWTT. Pekerja dapat memohon pengesahan nota pemeriksaan pengawas ke pengadilan negeri setelah bipartit gagal dan pengawas memeriksa.	87(5) s.d. (6)
Alih daya	PKWT wajib memuat pengalihan pelindungan hak jika vendor berganti. Masa kerja pada vendor sebelumnya dihitung kumulatif untuk batas Pasal 82(2) jika objek pekerjaan sama.	99(3) & (4)
PHK	Berakhirnya PKWT sesuai perjanjian tidak memerlukan perundingan bipartit.	229

Perbandingan dengan ketentuan lama

Aspek	Sebelumnya (UU 13/2003 jo. UU 6/2023, PP 35/2021)	UU 27/2026
Sumber pengaturan	UU 13/2003 (diubah UU 6/2023), dengan rincian PKWT di PP 35/2021.	Diatur langsung di UU (Pasal 80–91). UU 13/2003 dicabut seluruhnya. PP baru menyusul.
Durasi	Maksimal **5 tahun** termasuk perpanjangan (PP 35/2021 Pasal 8), dikukuhkan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. UU 13/2003: 2 tahun + 1 kali perpanjangan 1 tahun (Pasal 59(4)).	Maksimal **2 tahun** + 2 kali perpanjangan @ maksimal 1 tahun, **maksimal total 4 tahun** (Pasal 82(2)).
Pekerjaan “tidak terlalu lama”	Maksimal 5 tahun (PP 35/2021 Pasal 6).	Maksimal **2 tahun** (Pasal 87(1) huruf b).

Disclaimer: Informasi ini bersifat umum, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, silakan konsultasikan dengan penasihat hukum Anda.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id

Miko Ginting & Partners
Strategic Law Practices

Aspek	Sebelumnya (UU 13/2003 jo. UU 6/2023, PP 35/2021)	UU 27/2026
Pencatatan	Daring paling lama 3 hari kerja. Jika sistem daring belum tersedia, 7 hari kerja ke dinas (PP 35/2021 Pasal 14).	3 hari kerja ke Pemerintah Pusat/Daerah. PKWT tercatat dapat diakses pekerja dan pengawas (Pasal 87(3)-(4)).
Uang kompensasi dan sanksi	Kompensasi diatur PP 35/2021 Pasal 15-16 (mis. 1 bulan upah untuk 12 bulan kerja). Pelanggar dikenai sanksi administratif (Pasal 61).	Kewajiban kompensasi naik ke UU (Pasal 88). Sanksi: peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 89). Besaran diatur PP.
Masa percobaan	Sudah dilarang (PP 35/2021 Pasal 12).	Tetap dilarang, kini di tingkat UU (Pasal 86).

Hal yang belum jelas

1. **Tidak ada ketentuan peralihan khusus PKWT** (Pasal 300 s.d. 306). Belum jelas apakah PKWT yang berjalan melewati 4 tahun harus dikonversi dan apakah masa kerja sebelum 28 Oktober 2026 dihitung. Pendekatan konservatif: masa kerja berjalan ikut dihitung.
2. **Mekanisme pencatatan dan besaran uang kompensasi** masih menunggu PP (Pasal 87(7), 88(3)). Pasal 87(3) sendiri tidak mengatur sanksi tersendiri.
3. **Pekerjaan "tidak tetap"** (Pasal 87(1) huruf e) berpotensi ditafsirkan secara luas dan beririsan dengan larangan terhadap pekerjaan tetap.
4. **Cakupan uang kompensasi.** Pasal 88(1) mengaitkan kewajiban ini dengan semua alasan berakhirnya PKWT di Pasal 81(1), bukan hanya berakhirnya jangka waktu. Batas cakupannya, misalnya untuk pengakhiran melalui perjanjian bersama, menunggu PP.

Langkah yang kami sarankan

- **Audit PKWT berjalan:** tanggal mulai, perpanjangan, dan masa kerja kumulatif; prioritaskan yang sudah di atas 3 tahun.
- **Klasifikasikan pekerjaan** per Pasal 87(1); alihkan pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap ke PKWTT.
- **Perbarui template dan kalender kepatuhan:** tanpa masa percobaan, berbahasa Indonesia, pemberitahuan perpanjangan 7 hari, pencatatan 3 hari kerja, kompensasi saat berakhir, dan hindari pengakhiran dini.

Disclaimer: Informasi ini bersifat umum, bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, silakan konsultasikan dengan penasihat hukum Anda.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id

Miko Ginting & Partners
Strategic Law Practices

CLIENT BRIEF
16 November 2026

PKWT Under Law No. 27 of 2026 on Employment Protection

Law No. 27 of 2026 on Employment Protection (**"Law 27/2026"**) was promulgated on 28 October 2026 and **took effect on the date of promulgation** (Article 313).

This Law revokes Law 13/2003 in its entirety, together with **Chapter IV Part One Article 80(a) and Part Two Article 81 in the Annex to Law 6/2023** (Article 311).

This *Client Brief* focuses specifically on fixed-term employment agreements (PKWT), which are governed by Articles 80 to 91 and related provisions.

Key Points

- **Tighter duration cap:** maximum of 2 years + 2 extensions of up to 1 year each (**maximum total of 4 years**). Previously, up to 5 years was permitted (affirmed by Constitutional Court Decision 168/PUU-XXI/2023).
- **Non-compliant PKWTs are converted "by law" into PKWTTs** (not in writing, or made for work that does not meet Article 87).
- **Administrative duties elevated to statute level:** registration and compensation pay are now regulated directly in the Law. Administrative sanctions are expressly provided for compensation pay and language breaches, while the 7-day extension notice becomes an express duty under Article 82(3).
- **Implementing Government Regulations** must be issued by 28 October 2027 (Article 312). In the meantime, existing implementing regulations remain in force to the extent they do not conflict with Law 27/2026 (Article 310).

PKWT Provisions

Aspect	Provision	Article
Type of work	Only for work that by its nature will be completed within a certain time: one-off/temporary; expected to be completed within a maximum of 2 years; seasonal; new products/activities or those still in trial; non-permanent. **Prohibited for permanent work.**	87(1)-(2)
Duration and extension	Maximum 2 years, extendable at most 2 times of up to 1 year each. Written notice of the intended extension **at least 7 days** before the PKWT expires.	82

Disclaimer: This information is general in nature and is not legal advice. For specific matters, please consult your legal adviser.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id

Aspect	Provision	Article
Form, language, probation	Must be in writing, in Indonesian and Latin script (the Indonesian version prevails if bilingual; language breaches attract a written warning/administrative fine). Not in writing: becomes a PKWTT by law. Probation is prohibited and void by law; service is still counted.	83–86
Registration	Must be registered with the Central/Regional Government within **3 working days** of signing; accessible to the worker and labour inspectors.	87(3) & (4)
Compensation pay	Payable when the PKWT ends on any ground listed in Article 81(1) (including expiry of the term and completion of the work), based on length of service. Sanctions: written warning, administrative fine, and/or temporary suspension of part or all of business activities. Amount to be set by Government Regulation.	88–89
Early termination	The party terminating before the term ends must pay damages equal to the wages up to the end of the PKWT term.	90
Breach of conditions	Becomes a PKWTT by law. The worker may seek court ratification of the inspector's examination note from the district court after failed bipartite negotiation and an inspector examination.	87(5)-(6)
Outsourcing	The PKWT must provide for transfer of rights protection if the vendor changes; service with the previous vendor counts cumulatively toward the Article 82(2) limit if the work object is the same.	99(3) & (4)
Termination	Expiry of a PKWT in accordance with the agreement does not require bipartite negotiation.	229

Comparison with the Previous Rules

Aspect	Before (Law 13/2003 as amended by Law 6/2023; Government Regulation (GR) 35/2021)	Law 27/2026
Source of rules	Law 13/2003 (amended by Law 6/2023), with PKWT details in GR 35/2021.	Regulated directly in the Law (Articles 80–91). Law 13/2003 is revoked in full. New GRs to follow.
Duration	Maximum **5 years** including extensions (GR 35/2021 Art. 8), affirmed by Constitutional Court Decision 168/PUU-XXI/2023. Original Law 13/2003: 2 years + one 1-year extension (Art. 59(4)).	Maximum **2 years** + 2 extensions of up to 1 year each, **maximum total of 4 years** (Art. 82(2)).

Disclaimer: This information is general in nature and is not legal advice. For specific matters, please consult your legal adviser.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id

Miko Ginting & Partners
Strategic Law Practices

Aspect	Before (Law 13/2003 as amended by Law 6/2023; Government Regulation (GR) 35/2021)	Law 27/2026
Work "not too long"	Maximum 5 years (GR 35/2021 Art. 6).	Maximum **2 years** (Art. 87(1)(b)).
Registration	Online within 3 working days. If the online system is unavailable, 7 working days at the manpower office (GR 35/2021 Art. 14).	3 working days with the Central/Regional Government. Registered PKWTs are accessible to workers and inspectors (Art. 87(3)-(4)).
Compensation pay and sanctions	Compensation under GR 35/2021 Arts. 15–16 (e.g. 1 month's wage per 12 months of service). Violators face graduated administrative sanctions (Art. 61).	Compensation duty elevated to statute (Art. 88). Sanctions: written warning, administrative fine, and/or temporary suspension of business activities (Art. 89). Amount set by GR.
Probation	Already prohibited (GR 35/2021 Art. 12).	Still prohibited, now at statute level (Art. 86).

Open Questions

1. **No specific transitional provision for PKWT** (Articles 300-306). It is unclear whether ongoing PKWTs exceeding 4 years must be converted, and whether service before 28 October 2026 counts. Conservative approach: assume accrued service counts.
2. **Registration mechanics and the amount of compensation pay** still await Government Regulations (Articles 87(7), 88(3)). Article 87(3) itself provides no separate sanction.
3. **"Non-permanent" work** (Article 87(1)(e)) may be read broadly and overlaps with the prohibition on using PKWT for permanent work.
4. **Scope of compensation pay.** Article 88(1) ties this duty to all grounds for ending a PKWT in Article 81(1), not only expiry of the term. Limits on its scope, for example, for termination by mutual agreement, await a Government Regulation.

Recommended Steps

- **Audit current PKWTs:** start dates, extensions and cumulative service; prioritise those beyond 3 years.
- **Classify the work** against Article 87(1); move work that is in fact permanent to PKWTT.
- **Update templates and compliance calendar:** no probation, Indonesian language, 7-day extension notice, 3-working-day registration, compensation on expiry, and avoid early termination.

Disclaimer: This information is general in nature and is not legal advice. For specific matters, please consult your legal adviser.

Grha Tirtadi, R-203, Jl. Pangeran Antasari No. 18A
Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Jakarta 12410
+628118167464
+622175811734
info@mgpartners.id
www.mgpartners.id